

## Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Dengan Konsep Blue Economy Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belakang Padang

Helmi Pratama Firmansyah<sup>1</sup> Sri Rahayu<sup>2</sup>

International Program of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<sup>1</sup>  
Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>2</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 4 Agustus 2022

Revisi Akhir: 14 Agustus 2022

Diterbitkan Online: 31 Agustus 2022

#### KEYWORDS

Blue Economy, Management, Mangroves

### KORESPONDENSI

E-mail:

[pfhelmi@gmail.com](mailto:pfhelmi@gmail.com), [sriahayu@gmail.com](mailto:sriahayu@gmail.com)

### A B S T R A C T

The purpose of this study is an effort to apply the blue economy concept to optimize the potential of mangrove resources in improving the economy of coastal communities in the District of Back Padang. This research is motivated by the problem of misunderstanding for the community in utilizing the existing potential so that there is no looting of mangrove forests. The theory used in this discussion refers to the concept of the blue economy because it is oriented to the principle of strength and potential in the region as well as empowerment in strengthening the economy of coastal communities, this study also uses qualitative methods with descriptive research types. The results of this study indicate that the existence of the blue economy concept is able to answer in increasing knowledge and empowerment of coastal communities that the potential in mangrove forests can be processed into processed products such as syrup and crackers. In addition, it can create a central area for aquatic biotic cultivation, which can encourage the wheels of the economy for communities in coastal areas. The development of coastal areas must depart from its ecological and economic functions and the concept of Blue economy is a model in the field of economic strategy that is implemented in coastal areas.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu nawacita Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo adalah pembangunan wilayah dalam konsep pembangunan kemaritiman. Salah satu strategi untuk menjaga lingkungan adalah gagasan pembangunan berkelanjutan. Salah satu negara yang mendukung gagasan pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah Indonesia, yaitu dalam bentuk ekonomi biru. Indonesia merupakan negara kelautan dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, sehingga penggunaan konsep ekonomi biru menjadi lebih efektif (Prayuda, Sary and Riau, 2019).

Eksplorasi sumber daya alam ini sudah melampaui kapasitas atau daya dukungnya karena konsep ekonomi biru sangat tepat dan praktis untuk dijadikan landasan bagi para pengelola sektor kelautan dan perikanan

yang saat ini kita akui masih belum optimal dan cenderung menjadi eksploitatif. kapasitas.

Sudah saatnya Indonesia, negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, mencapai kemandirian dengan memanfaatkan wilayah laut sebaik-baiknya dengan tetap mempertimbangkan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial yang khas di wilayah tersebut dan mengelolanya secara berkelanjutan. (Thoriq Maulana *et al.*, 2015). Ekosistem mangrove sering disebutkan seperti hutan mangrove atau hutan payau. Jenis hutan tropis yang disebut habitat mangrove sering tumbuh di samping atau dekat muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Ekosistem mangrove banyak dijumpai di daerah pesisir yang terlindung dari gelombang (Huda, 2008). Menurut Hutchings dan Saenger (1987) Daerah tropis dan subtropis memiliki pantai-

pantai terlindung di mana mangrove tumbuh subur, yang merupakan ciri khas perkembangan tumbuhan pesisir (ADLN, 2005). Peta sebaran mangrove di Pulau Batam yang dibuat dengan menggunakan citra Landsat 8 dapat digunakan sebagai sumber data mengenai sebaran mangrove di Pulau Batam. Sagulung merupakan kecamatan dengan kawasan mangrove terluas. Kecamatan Sagulung memiliki luas mangrove terluas (7.189.779,33 m<sup>2</sup>), sedangkan Kecamatan Batu Ampar memiliki luas paling sedikit (170.814,86 m<sup>2</sup>) dan Kecamatan Lubuk Baja tidak memiliki mangrove sama sekali. Kelas kerapatan jarang mendominasi mangrove di Pulau Batam, dengan kisaran nilai NDVI - 0,09 hingga -0,01 (Irawan and Malau, 2016). (Sumber: Olahan Penelitian Terdahulu)



**Gambar 1. Peta Persebaran Mangrove Di Kota Batam**



**Gambar 2. Contoh Tempat Rekreasi Mangrove di Kota Batam**

Menurut informasi luasan hutan mangrove di Kecamatan Belakang Padang selama delapan tahun terakhir telah menyusut

sebesar 28,55% (1.258,60 ha), yang menyebabkan tambahan pembangunan (perumahan dan tambak udang) (Sumber: Nahib,2009).

Potensi kerusakan hutan bakau sangat tinggi terutama karena pembukaan dan penjarahan hutan bakau itu sendiri, terutama di daerah-daerah yang perkembangan industrinya sangat pesat, seperti yang terjadi di Kota Batam yang hanya 40% dari bakau yang masih ada ( Sumber: BKIPM RI). Akibat penimbunan dan penjarahan hutan mangrove, hanya tersisa tempat wisata di sepanjang garis pantai Pulau Batam. Biota dan habitat di pulau-pulau yang masih memiliki hutan mangrove harus dilindungi. Mangrove dapat berfungsi sebagai penahan erosi sekaligus sebagai lokasi pengolahan komoditas, kandang ternak, dan wisatawan.



**Gambar 3. Sirup, Dodol, Selai dari buah pidada**

Sumber: BPHM Wilayah I, 2007

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah mangrove dari Desa Wanasari layak untuk diolah dan tidak tercemar limbah karena buah yang akan digunakan merupakan buah matang pada pohonnya. Anggota Pokhlasar Wanasari diajari apa saja yang dikuasai Kadek. Di Desa Kepiting Wanasari, produk olahan buah mangrove ini ditawarkan untuk dijual. Mangrove tidak boleh dieksploitasi atau ditebang, dan hanya buah matang dari pohon yang boleh dikonsumsi. Orang bisa berargumen bahwa hanya buah bakau dan air nipah tumbuhan nipah yang digunakan. Organisasi Pokhlasar Wanalestari terus mendukung bagian dari kelestarian dan konservasi hutan mangrove (Farhaeni, 2016)

**Tabel 1. Prinsip Ekonomi pada Usaha Pengolahan Ikan di Masyarakat Pesisir Kabupaten Brebes, Jawa Tengah**

Aturan Ekonomi Biru	Prinsip Ekonomi Biru dalam Praktek
Minimalkan limbah	Ada lima toko fillet di Kluwuk, di mana lima ton tulang dan kulit ikan diproduksi setiap minggunya.
Efek pengganda	Pengelolaan usaha kerupuk kulit dan penghancur tulang mampu mendongkrak pendapatan bulanan hingga Rp. 600.000
Keterlibatan sosial	Dibutuhkan 1-2 orang untuk bekerja di industri pengolahan kulit dan tulang.
Inovasi dan adaptasi	I Memanfaatkan sisa-sisa kulit dan tulang untuk membuat produk makanan adalah sebuah inovasi. Premis di balik inisiatif ini adalah bahwa banyak tulang dan kulit dibuang tetapi tidak pernah digunakan.

Sumber: Olahan Data Primer Penelitian Terdahulu

Salah satu masyarakat pesisir yang telah mengadopsi pendekatan ekonomi biru adalah Kabupaten Brebes di Jawa Tengah, seperti terlihat pada tabel di atas. pengolahan tulang ikan menjadi abon ikan dan kulit ikan menjadi kerupuk ikan adalah salah satu contoh dari ide ekonomi biru yang sedang dijalankan. Dengan mengolah tulang dan kulit ikan menjadi barang olahan, proses pengolahan kulit mampu menerapkan prinsip minimisasi limbah.

Barang olahan memiliki efek pengganda dengan memberikan pendapatan tambahan dan sumber dukungan yang berbeda. Prinsip inklusi sosial diterapkan dalam pengolahan kulit dan tulang ikan karena semua masyarakat pesisir dapat berpartisipasi dalam prosesnya karena tidak membutuhkan banyak uang. Pemanfaatan sampah sesuai prinsip inovasi dan adaptasi.

Untuk itu adanya konsep *blue economy* untuk merubah pola pikir masyarakat dalam melakukan pemanfaatan potensi yang ada pada mangrove tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Siapa saja Pihak yang Terlibat Dalam Eksploitasi Sumber Daya Mangrove dan Bagaimana cara mengoptimalkan Sumber Daya Mangrove Berbasis *Blue Economy* Bagi Masyarakat Kecamatan Belakang Padang Kota Batam?

## 2. METODE

### *Blue Economy*

*Blue Economy* yaitu konsep pembangunan ekonomi yang tepat. Industri ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memajukan kesejahteraan masyarakat secara adil, menjaga daya dukung dan standar lingkungan pesisir dan laut. Ide Ekonomi Biru secara efektif memanfaatkan sumber daya alam tanpa limbah sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan. sistem produksi yang ramah lingkungan, berkelanjutan lingkungan, inovatif, dan telah mengadopsi teknologi hijau.

*The Long-Term Benefits of Sustainable Marine Resource Use for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries, The Potential of the Blue* (Pauli, 2018).

Gunter Pauli menerbitkan bukunya *The Blue Economy* pada 2010 dan menggunakannya untuk mengajukan gagasan "Ekonomi Biru." Salah satu aspek transisi dari ekonomi terestrial ke ekonomi maritim yang mempesona orang adalah gagasan bahwa ekonomi hijau dapat diimplementasikan sendiri tanpa dukungan ekonomi biru. Apalagi mengingat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, pemerintah tetap memegang teguh filosofi ekonomi biru dalam semua rencana pembangunan (Mira, Firdaus and Reswat, 2014).

### **Pengelolaan**

Pengelolaan adalah upaya sistematis dan menyeluruh yang dilakukan untuk fungsi lingkungan hidup dan pencegahan kerusakan,

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 yang memuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 1 ayat (2).

Manajemen merupakan ungkapan yang digunakan dalam ilmu manajemen, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2003:119). Kata manajemen secara etimologis berhubungan dengan kata kerja manage (mengelola), dan biasanya merujuk pada tata cara atau penanganan tugas untuk mencapai suatu tujuan.

Oleh karena itu, manajemen merupakan salah satu cabang ilmu manajemen yang mengkaji tentang bagaimana mengendalikan dan menangani suatu hal guna mencapai tujuan tertentu (D. Alita, S. Priyanta, 2014)

Manajemen adalah proses pengorganisasian tugas yang akan dilakukan oleh fungsi manajemen, yang jelas membantu dalam menentukan format tujuan yang disepakati bersama (Dr. Hj. Fory A. Naway, 2016).

### **Mangrove**

Tidak diketahui secara pasti dari mana kata "mangrove" berasal. Menurut yang lain, kata itu mungkin merupakan gabungan dari bahasa Portugis dan Inggris. Ketika istilah "mangue" (istilah Portugis untuk satu jenis pohon bakau) dan "rumpun" (padanan bahasa Inggris) digabungkan, "mangrove" atau "mangrove" hasilnya. Mangrove adalah tumbuhan pohon atau komunitas tumbuhan yang ada di zona pasang surut antara laut dan darat (Dr. Hj. Fory A. Naway, 2016).

Hutan mangrove, yang biasanya terdapat di lumpur, pasir, atau lumpur berpasir, adalah hutan yang selalu atau sering diatur oleh air laut dan tunduk pada pasang surut. Mangrove adalah bentuk vegetasi yang khas di wilayah pesisir; tingginya bisa mencapai 50–60 meter dan floranya memiliki kebiasaan pohon-pohon besar.

Ekosistem mangrove merupakan kumpulan makhluk hidup (tumbuhan dan hewan) yang hidup berdampingan dalam suatu habitat mangrove. Karena mereka menggabungkan lingkungan darat dan perairan, mangrove merupakan jenis ekosistem yang khusus. Hutan mangrove memiliki peran penting dalam

kehidupan masyarakat dimana mereka berada, terutama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti kayu dan biota air (ikan, udang, dan kepiting), yang biasanya tidak ditemukan di hutan jenis lain (Thew *et al.*, 2015)

### **Metode Penelitian**

Karena penelitian ini akan menggambarkan atau mengkarakterisasi gejala yang sesuai dengan kondisi saat ini, maka pendekatan deskriptif kualitatif diadopsi ditengah-tengah masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mangrove di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan isu-isu yang dikaji yakni Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Dengan Konsep *Blue Economy* Bagi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Belakang Padang

## **3. HASIL PENELITIAN**

### **Pihak yang Terkait Dalam Eksploitasi Sumber Daya Mangrove**

Menurut Sri Puryono, pengelolaan akademik dan teknis Sumber daya alam hutan bakau, pariwisata, dan metode pertanian bakau semuanya berdampak besar pada bagaimana tempat-tempat itu tumbuh. Namun, lembaga dan peraturan memiliki dampak kecil terhadap konservasi (Soedarmo, 2018). Pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya mangrove sebagai berikut:

1. *Stock Holder*, khususnya organisasi masyarakat yang bungkam dengan mendasarkan eksistensinya pada kekayaan alam yang terdapat di sepanjang pantai
2. *Share Holder* yang juga pemegang saham dalam budidaya dan operasi perikanan pesisir lainnya.
3. *Stake Holder*, atau masyarakat umum yang berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya alam dan hasil usaha di wilayah pesisir, termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lain di luar wilayah pesisir.

## Bagaimana mengoptimalkan Sumber Daya Mangrove Berbasis Blue Economy Bagi Masyarakat Kecamatan Belakang Padang Kota Batam

Potensi di wilayah ini memiliki efek yang menguntungkan dalam meningkatkan ekonomi lokal dan menunjukkan bagaimana sumber daya pesisir digunakan dalam banyak masalah, seperti yang mempengaruhi daya tarik pesisir dan produksi ikan. Upaya pengelolaan sumber daya mangrove dengan prinsip efisiensi sumber daya, *zero waste*, tanggung jawab sosial, sistem siklus produksi, inovasi dan adaptasi, serta kelembagaan yang berkelanjutan dikenal dengan manajemen ekonomi biru.

Berikut ini adalah beberapa taktik yang dapat digunakan untuk mengelola sumberdaya mangrove berbasis ekonomi biru:

1. Meningkatkan industri berbasis potensi sumberdaya mangrove di lokasi pesisir. Strategi pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pertumbuhan ekonomi makro masyarakat, yang akan mendorong perekonomian lokal tanpa mengubah status masyarakat sebagai subjek pembangunan dan bukan sebagai objek.
2. Meningkatkan infrastruktur sesuai dengan tujuan UMKM untuk mengembangkan potensi yang sudah ada dan sumber daya mangrove, yang menawarkan beberapa keuntungan bagi masyarakat setempat.
3. Memulihkan, menjaga, dan mempertahankan keanekaragaman ekosistem, produktivitas, ketahanan, fungsi laut, dan nilai yang melekat pada ekosistem.
4. Selain itu, adanya kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya mangrove untuk dibudidayakan potensinya ataupun dijadikan ekowisata.

Bagaimana status ekologi dan ekonomi masyarakat dalam kaitannya dengan hutan mangrove?

1. Tujuan kebijakan pemerintah daerah adalah untuk mengetahui bahwa berbagai tindakan dan tindakan praktis dapat membantu hutan bakau memberikan dampak positif pada kekayaan dan kesejahteraan lingkungan.
2. Masyarakat harus memiliki akses penyuluhan tentang penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah daerah tentang hutan mangrove untuk menghilangkan mitos bahwa keberadaan tanaman mangrove hanya berfungsi untuk menghambat produktivitas tambak mereka atau terlibat dalam penjarahan luas hutan mangrove.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap mangrove menawarkan bantuan dan dukungan.

## Simpulan

Hadirnya konsep *blue economy* ini tentu berdampak positif bagi masyarakat wilayah pesisir terutama pada Kecamatan Belakang Padang Kota Batam. Inisiatif utama untuk meningkatkan posisi ekonomi wilayah pesisir adalah ekonomi biru. Konsep ekonomi biru sudah ada, dan diragukan manfaatnya bagi warga pesisir, khususnya di Kecamatan Belakang Padang di Kota Batam.

Inisiatif utama untuk meningkatkan posisi ekonomi wilayah pesisir adalah ekonomi biru. Ekonomi biru, yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan lebih banyak barang dan nilai sekaligus menangani masalah sosial, dapat menjadi model bagi pertumbuhan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Asia. negara-negara Pasifik.

Gagasan ekonomi tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai pemanfaatan mangrove bagi lingkungan dengan menciptakan usaha berbasis potensi sumberdaya mangrove di wilayah pesisir. Strategi pemberdayaan masyarakat berpusat pada pembangunan ekonomi makro bagi masyarakat, yang akan meningkatkan perekonomiannya dengan tetap menjadikannya sebagai subjek pembangunan, bukan objek

## DAFTAR PUSTAKA

- D. Alita, S. Priyanta, And N. R. 2019 (2014) ‘Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat’, *Journal Of Chemical Information*, 53(9), Pp. 1689–1699.
- Dr. Hj. Fory A. Naway, M. P. (2016) *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*.
- Farhaeni, M. (2016) ‘Komodifikasi Ragam Buah Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali’, *Jurnal Studi Kultural*, I(1), Pp. 21–27.
- Hilman, Hakim Muhammad (2014) ‘Pengaruh Kultural Sekolah Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan’, *Universitas Pendidikan Indonesia*, Pp. 36–54.
- Huda, N. (2008) ‘Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi’, *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*. Available At: [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/18579/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/18579/).
- Irawan, S. And Malau, A. O. (2016) ‘Analisis Persebaran Mangrove Di Pulau Batam Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh’, *Jurnal Integrasi*, 8(2), Pp. 80–87.
- Mira, Firdaus, M. And Reswat, E. (2014) ‘Penerapan Prinsip Blue Economy Pada Masyarakat Pesisir’, *Buletin Riset Sosek Kelautan Dan Perikanan*, 9(1), Pp. 17–23.
- Nahib, I. (No Date) ‘Analisis Ekonomi Keterkaitan Perubahan Hutan Mangrove Dan Udang Di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
- Prayuda, R., Sary, D. V. And Riau, U. I. (2019) ‘Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi Asean A’ *Indonesian Journal Of International Relations*, 3(2), Pp. 46–64.
- Situmorang, C. P. (2019) ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kecamatan Pantai Labu.
- Soedarmo, S. P. K. (2018) *Pelestarian Hutan Mangrove Dan Peran Serta Masyarakat Pesisir*.
- Utun\_Mangrove\_Dan\_Peran\_Serta\_Masyarakat\_Pesisir.Pdf. Tamura, H. (2018) ‘Bab Iii Kuantitatif Pendekatan Korelasional’, *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), P. 287.
- Thew, R. *Et Al.* (2015) ‘I Identifikasi Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Penunjang Ekowisata Di Pulau Tanakeke, Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar’, *Metrologia*, 53(5), Pp. 1–116. Available At: [Http://Publicacoes.Cardiol.Br/Portal/Ijcs/Portugue](http://Publicacoes.Cardiol.Br/Portal/Ijcs/Portugue)

Thoriq Maulana, M. *Et Al.* (2015) 'Laporan Akhir Laporan Akhir (201310200311137), Pp. 78–79. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik

.